

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial semata, tetapi juga menuntut perusahaan untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Perubahan ekspektasi pemangku kepentingan, meningkatnya kesadaran sosial dan lingkungan, serta persaingan bisnis yang semakin ketat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menekankan keseimbangan antara kinerja ekonomi, kepedulian terhadap lingkungan, serta tata kelola perusahaan yang baik (Farhan, 2024).

Menurut Nurmasari et al. (2025:11) *Environmental, Social, and Governance* (ESG) adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan atau organisasi berdasarkan tiga aspek utama: lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola perusahaan (governance). Berdasarkan dari OECD (2022), ESG merujuk pada pendekatan yang melibatkan pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses alokasi aset dan penilaian risiko, dengan tujuan untuk mencapai keuntungan finansial yang berkelanjutan dalam jangka panjang. ESG menjadi semakin penting dalam dunia bisnis dan investasi sebagai standar keberlanjutan yang membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengevaluasi risiko dan peluang jangka panjang dari suatu perusahaan.

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), khususnya pada aspek lingkungan (*environmental*), tercermin melalui upaya pemanfaatan limbah pelepah kelapa sawit yang sebelumnya tidak bernilai ekonomi menjadi produk yang memiliki nilai guna. Pemanfaatan limbah pelepah sawit tersebut merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi volume limbah perkebunan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta mendukung praktik usaha yang berorientasi pada keberlanjutan (Desparita et al., 2023)

Strategi pemasaran hijau (*green marketing*) menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini, karena tidak hanya menekankan pada keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Melalui penerapan *green marketing*, pelaku usaha dapat memperkuat citra positif produk lidi sawit sebagai produk ramah lingkungan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas akses pasar terutama di segmen ekspor yang kini semakin menuntut standar keberlanjutan (Taali, 2024).

Selain prinsip ESG, strategi pemasaran juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan usaha. Teori pemasaran menyatakan bahwa strategi pemasaran yang efektif, khususnya pemasaran hijau (*green marketing*), mampu menciptakan nilai tambah bagi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Strategi pemasaran hijau mencakup *green product*, *green price*, dan *green promotion*, yang menekankan pada produk ramah lingkungan, penetapan harga yang mencerminkan nilai keberlanjutan, mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan (Fadilah & Wibawa, 2024).

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor perkebunan

kelapa sawit. Di Kecamatan Bahorok, Hinai, Secanggang, dan Wampu, terdapat usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi yang dijalankan oleh masyarakat secara skala kecil dan berbasis rumah tangga.

Table 1.1
Luas Tanaman Produksi Kelapa Sawit di Sumatera Utara 2021-2024

Tahun	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
2021	1.285,80	7.451,9
2022	1.370,40	7.789,0
2023	1.352,23	803,0
2024	1.357,23	8.241,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan luas tanaman dan produksi kelapa sawit dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan. Di tahun 2021 luas tanam 1.285,80 ha dan produksi 7.451,9 ton. Di tahun 2022 luas tanam 1.370,40 dan produksi 7.789,0. Di tahun 2023 luas tanam 1.352,23 dan produksi 803,0. Pada tahun 2024 luas tanam 1.357,23 ha dan produksi 8.241,9 ton mengalami kenaikan terus menerus. Sehingga berpengaruh kepada produksi lidi kelapa sawit sampai pada tahun 2024 terjadi kenaikan produksi kelapa sawit.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Langkat (2023) perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, memiliki luas sebesar 58.227,40 hektar.

Tabel 1.2
Luas Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Kabupaten Langkat
Menurut Kecamatan, 2023

No.	Kecamatan	Luas Areal - Kelapa Sawit (ribu ha) (Ribul Ha)
1	Bohorok	7.274,00
2	Sirapit	2.255,00
3	Salapian	7.846,00
4	Kutambaru	1.183,00
5	Sei Bingai	5.686,00
6	Kuala	2.033,00
7	Selesai	5.738,00
8	Binjai	775,00
9	Stabat	545,00
10	Wampu	5.113.50
11	Batang Serangan	2.610,00
12	Sawit Seberang	451,00
13	Padang Tualang	791,00
14	Hinai	1.468,00
15	Secanggang	1.081,00
16	Tanjung Pura	1.530,00
17	Gebang	2.304,00
18	Babalan	223,00
19	Sei Lapan	3.497,00
20	Brandan Barat	1030
21	Besitang	2793.9
22	Pangkalan Susu	922
23	Pematang Jaya	1078
kabupaten Langkat		58.227.4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2023

Data pemerintah daerah dan BPS Kabupaten Langkat memperlihatkan luasan tanaman yang stabil, menandakan bahwa aliran biomassa dari perkebunan ke masyarakat sekitar bersifat kontinu dan berpotensi menjadi sumber bahan baku untuk industri pengolahan lokal. bahan baku untuk industri pengolahan lokal.

Pemilihan empat kecamatan tersebut juga mempertimbangkan kondisi lapangan, khususnya ketersediaan bahan baku dan akses terhadap limbah pelepah

sawit. Tidak seluruh perkebunan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil pelepah sawit karena adanya pertimbangan keamanan dan risiko kehilangan hasil perkebunan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua kecamatan yang memiliki luas perkebunan sawit dapat dijadikan lokasi penelitian. Oleh karena itu, Kecamatan Bahorok, Wampu, Hinai, dan Secanggang dipilih karena terdapat pelaku usaha pengolahan pelepah sawit menjadi lidi yang sesuai dengan kriteria penelitian dan dapat dijangkau untuk pengumpulan data. Akses terhadap bahan baku juga tidak merata. Beberapa area perkebunan menerapkan pembatasan pengambilan pelepah sawit karena alasan keamanan, termasuk adanya kasus pencurian serta kekhawatiran terhadap dampak kerusakan lingkungan. Situasi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha harus mencari sumber bahan baku di lokasi yang lebih jauh atau menunggu persetujuan tertentu sebelum mengambilnya.

Di sisi lain, walaupun produk yang dihasilkan berasal dari limbah dan berpotensi dikategorikan sebagai produk ramah lingkungan, sebagian besar pelaku usaha belum optimal dalam memasarkan nilai “hijau” tersebut. Sistem pemasaran masih bersifat tradisional dan terbatas pada lingkup pasar lokal atau berdasarkan pesanan tertentu. Padahal, jika dikembangkan melalui strategi pemasaran hijau yang tepat, produk tersebut memiliki peluang besar untuk memperoleh nilai tambah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, pengembangan usaha di empat kecamatan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan yang mengurangi optimalisasi hasilnya. Salah satu kendala utama terletak pada akses terhadap bahan baku. Tidak semua area perkebunan sawit dapat diakses secara leluasa oleh masyarakat, karena adanya pembatasan dari pihak pengelola.

Pembatasan ini umumnya disebabkan oleh kasus pencurian maupun kekhawatiran akan dampak kerusakan lingkungan apabila pengambilan pelepah tidak terkontrol. Akibatnya, ketersediaan bahan baku menjadi tidak menentu dan secara langsung memengaruhi kelancaran serta kapasitas produksi para pelaku usaha.

Di samping itu, kemampuan produksi juga masih terbatas karena sebagian besar proses pengolahan dilakukan secara manual dengan peralatan yang sederhana. Kondisi ini berpengaruh terhadap jumlah produk yang dihasilkan dan konsistensi mutu barang. Dari aspek pemasaran, walaupun produk yang dihasilkan berasal dari limbah dan memiliki nilai ramah lingkungan, belum seluruh pelaku usaha mampu mengimplementasikan strategi pemasaran hijau secara efektif.

Oleh karena itu, potensi ekonomi dapat dilihat dari banyaknya unit usaha yang beroperasi, keterlibatan tenaga kerja, serta terbentuknya aktivitas ekonomi berbasis pemanfaatan limbah sawit di tingkat lokal. Namun demikian, berbagai kendala dalam hal akses bahan baku, kapasitas produksi, dan penerapan strategi pemasaran menunjukkan bahwa potensi tersebut masih belum berkembang secara optimal. Kondisi inilah yang menegaskan pentingnya penelitian ini, guna menganalisis secara lebih mendalam bagaimana strategi pemasaran hijau dapat berperan dalam memperkuat keberlanjutan usaha sekaligus mengatasi hambatan yang ada.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha di keempat kecamatan tersebut tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga menghadapi tantangan terkait pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola usaha. Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi pendekatan yang relevan untuk mendorong keberlanjutan usaha.

Secara teoretis, penerapan prinsip ESG mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha, serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka Panjang (Rusli Gustanto¹, 2025).

Tabel 1.3
Jumlah unit usaha pemanfaatan limbah sawit

No	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha
1	Bahorok	51
2	Hinai	45
3	Secanggang	30
5	Wampu	25

Sumber :Hasil Observasi Peneliti

Data pada Tabel 1.3 menggambarkan sebaran jumlah unit usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat berdasarkan wilayah kecamatan. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unit usaha tidak merata di setiap kecamatan. Kecamatan Bahorok memiliki jumlah unit usaha paling banyak, yaitu 51 unit, yang menunjukkan bahwa aktivitas pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di wilayah tersebut relatif lebih berkembang. Kecamatan Hinai berada pada urutan kedua dengan 45 unit usaha, diikuti Kecamatan Secanggang sebanyak 30 unit usaha. Sementara itu, Kecamatan Wampu memiliki jumlah unit usaha paling sedikit, yaitu 25 unit usaha.

Keunikan empat kecamatan tersebut semakin terlihat dari adanya perbedaan pola produksi dan variasi harga di setiap wilayah. Di Kecamatan Wampu, pemanfaatan pelepah sawit tidak berhenti pada pengolahan menjadi lidi saja. Sisa daun yang tidak terpakai justru dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sebagai pakan ternak, sehingga hampir tidak ada bagian yang terbuang atau dibakar. Praktik ini mencerminkan pola pengelolaan limbah yang lebih efisien dan

ramah lingkungan, karena satu sumber daya dapat memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu sektor.

Berbeda dengan itu, Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Hinai memiliki keunggulan pada kualitas bahan baku yang dihasilkan. Lidi dari kedua wilayah ini dikenal lebih panjang, kuat, dan rapi, sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasaran. Karakteristik tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengepul maupun distributor yang mengutamakan standar kualitas tertentu. Akibatnya, harga jual di kedua kecamatan ini cenderung lebih kompetitif dibandingkan wilayah lainnya.

Sementara itu, Kecamatan Secanggang menunjukkan dinamika harga yang cukup beragam. Masyarakat menjual lidi dalam dua kondisi, yakni masih hijau dan sudah dikeringkan. Lidi hijau biasanya dipasarkan dengan harga sekitar Rp2.000–Rp3.000, sedangkan lidi kering dapat mencapai Rp4.000–Rp5.000. Selisih harga ini mencerminkan adanya nilai tambah dari proses pengeringan. Dengan kata lain, semakin besar tahapan pengolahan yang dilakukan, semakin tinggi pula nilai jual yang diperoleh. Hal ini membuka peluang bagi peningkatan pendapatan apabila pelaku usaha mampu meningkatkan kualitas serta proses produksinya.

Keberagaman kondisi di keempat kecamatan tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari pemanfaatan pelepah sawit memang nyata, namun berkembang dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ada wilayah yang unggul dalam efisiensi pemanfaatan limbah, ada yang menonjol dari segi kualitas bahan baku, dan ada pula yang memperlihatkan variasi harga berdasarkan tingkat pengolahan. Perbedaan-perbedaan inilah yang membuat empat kecamatan tersebut

relevan dan menarik untuk diteliti lebih mendalam, karena masing-masing memiliki dinamika ekonomi serta tantangan keberlanjutan yang khas.

Selain itu, faktor akses terhadap sumber daya juga menjadi alasan penting. Tidak semua wilayah perkebunan sawit di 23 kecamatan tersebut dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Beberapa area perkebunan menerapkan pembatasan karena adanya kasus pencurian maupun kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pemanfaatan pelepah sawit sebagai bahan baku usaha di beberapa kecamatan. Akibatnya, perkembangan usaha tidak merata di seluruh wilayah, sehingga tidak semua kecamatan memenuhi kriteria sebagai lokasi penelitian.

Dengan demikian, fokus penelitian pada empat kecamatan bertujuan agar pengumpulan data lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pemilihan ini justru memperkuat kualitas penelitian karena memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai penerapan strategi pemasaran hijau serta upaya pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perbedaan jumlah unit usaha antar kecamatan menunjukkan adanya variasi dalam potensi ketersediaan bahan baku, kemampuan sumber daya manusia, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan limbah pelepah sawit. Perbedaan ini dapat dibuktikan melalui data lapangan yang diperoleh dari hasil pendataan langsung kepada pelaku usaha dan aparat desa setempat, yang menunjukkan bahwa kecamatan dengan akses perkebunan sawit yang lebih terbuka dan ketersediaan bahan baku yang lebih stabil cenderung memiliki jumlah unit usaha yang lebih banyak. Sebaliknya, kecamatan dengan

keterbatasan akses terhadap perkebunan sawit atau minimnya keterampilan pengolahan menunjukkan jumlah unit usaha yang relatif lebih sedikit.

Berdasarkan hasil pendataan tersebut, total pelaku usaha yang tercatat sebanyak 151 orang. Jumlah ini kemudian ditetapkan sebagai populasi dalam penelitian, karena mencerminkan keseluruhan pelaku usaha yang aktif dan relevan dengan fokus kajian. Dengan demikian, penentuan populasi didasarkan pada data riil di lapangan, sehingga memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Data ini diperoleh berdasarkan hasil observasi langsung peneliti di lapangan, sehingga dapat dijadikan gambaran awal mengenai sebaran pelaku usaha serta dasar dalam menentukan populasi penelitian. Keberadaan unit usaha yang tersebar di beberapa kecamatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi memiliki potensi ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap pemanfaatan limbah dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Langkat.

Dari aspek lingkungan (environmental), sebagian pelaku usaha di Kecamatan Bahorok, Hinai, Secanggang, dan Wampu memanfaatkan bahan baku lokal dan menjalankan proses produksi sederhana. Namun, pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan bahan baku, serta kesadaran terhadap dampak lingkungan masih belum dilakukan secara terstruktur dan terukur. Dari aspek sosial (social), usaha-usaha tersebut banyak melibatkan tenaga kerja keluarga, sehingga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja (Sibuea & Sibuea, 2022).

Dari sisi strategi pemasaran, usaha pengolahan lidi di Kecamatan Bahorok, Hinai, Secanggang, dan Wampu masih didominasi oleh pemasaran tradisional, seperti penjualan langsung dan pemasaran dari mulut ke mulut. Pemanfaatan

strategi pemasaran hijau secara optimal, termasuk pengemasan ramah lingkungan, penetapan harga berbasis nilai keberlanjutan, serta promosi yang menonjolkan aspek lingkungan, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip ESG dan strategi pemasaran hijau belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal (Pratiwi,2020).

Di Kabupaten Langkat, Limbah pelepah sawit yang umumnya dibuang begitu saja dapat menimbulkan permasalahan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang berkelanjutan, pelepah sawit kini mulai dimanfaatkan menjadi bahan baku produk bernilai ekonomi, seperti lidi sawit yang dapat diolah menjadi sapu, alat rumah tangga, hingga bahan ekspor (*mediacenter*,2022).

Proses pembuatan sapu lidi dari pelepah kelapa sawit diawali dengan pengambilan pelepah yang telah didodos atau dipotong dari batang kelapa sawit, kemudian dikumpulkan di lokasi tertentu. Selanjutnya, pelepah tersebut dipisahkan antara daun dan seratnya untuk mengambil bagian lidi yang keras. Lidi yang telah diperoleh kemudian dibersihkan menggunakan pisau cutter guna menghilangkan sisa serat yang menempel, , lidi dijemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering agar kualitas dan daya tahannya meningkat.



Gambar 1.1
Pengumpulan Bahan Baku
Sumber :Hasil Observasi Peneliti



Gambar 1.2
Proses Perautan

Sumber :Hasil Observasi Peneliti



Gambar 1.3
Penjemuran Sebelum Dipasarkan

Sumber :Hasil Observasi Peneliti

Berdasarkan pertimbangan bahwa ada 4 kecamatan yang merupakan produksi kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara dan memiliki perkembangan usaha yang mengolah limbah pelepah sawit menjadi produk bernilai ekonomi, yaitu: Kecamatan Bahorok, yang memiliki area perkebunan sawit yang luas dengan masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor perkebunan dan pengolahan hasil sawit. Di wilayah ini, kegiatan pengumpulan dan pengolahan lidi sawit banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat secara rumah tangga.

Di Kecamatan Secanggang, usaha pengolahan lidi sawit berkembang cukup pesat karena kedekatan wilayahnya dengan jalur distribusi menuju pasar

Binjai dan Medan. Kegiatan produksi di daerah ini umumnya dilakukan secara manual dan menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian masyarakat pedesaan. Kecamatan Hinai merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan limbah pelepah sawit karena dekat dengan beberapa perusahaan perkebunan besar. Pengrajin lidi di wilayah ini telah mengembangkan jaringan pemasaran hingga ke luar daerah dan menjadi salah satu contoh penerapan ekonomi sirkular berbasis limbah pertanian. Kecamatan Wampu adalah salah satu kecamatan dengan luas lahan perkebunan yang signifikan dan aktivitas agro-perkotaan terkait sawit. Di wilayah ini, terdapat beberapa pelaku usaha dan pengepul besar yang menyalurkan hasil produksi dari kecamatan-kecamatan sekitarnya ke pasar regional maupun nasional.

Berdasarkan hasil observasi awal di lokasi penelitian, Masih ditemukan pelaku usaha yang belum maksimal dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Penggunaan sumber daya yang kurang efisien serta pengelolaan limbah yang belum optimal berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Padahal, penerapan praktik usaha yang ramah lingkungan dapat meningkatkan reputasi usaha serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lingkungan masyarakat, terlihat adanya kecenderungan pelaku usaha atau konsumen yang sering berpindah agen karena pertimbangan harga yang lebih tinggi. Keputusan tersebut umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan hubungan kerja sama. Namun, ketika kerja sama dengan agen baru tidak berjalan sesuai harapan, timbul rasa ketidakpuasan. Ketika ingin kembali menjalin kerja sama dengan agen sebelumnya, tidak jarang agen tersebut sudah tidak bersedia menerima kembali.

Situasi ini menyebabkan kesulitan dalam proses penyaluran produk sehingga usaha menjadi tidak stabil bahkan terhenti. Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kepercayaan, loyalitas, dan komitmen dalam hubungan sosial antar pelaku usaha.

Permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya sistem tata kelola dalam hubungan kerja sama usaha. Ketidadaan aturan yang jelas, perjanjian tertulis, maupun mekanisme kerja sama jangka panjang membuat hubungan bisnis mudah terputus. Tata kelola yang kurang terstruktur berpotensi meningkatkan risiko kerugian dan menghambat perkembangan usaha secara berkelanjutan.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku usaha pengolahan lidi sawit di Kabupaten Langkat menerapkan prinsip ESG secara konsisten. Sebagian masih menghadapi kendala dalam pengelolaan limbah, pemberdayaan tenaga kerja lokal secara transparan. Hal ini berpotensi memengaruhi daya saing serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, strategi pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha masih tergolong tradisional, dengan fokus utama pada penjualan langsung ke pengepul tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan citra ramah lingkungan yang kini semakin diminati oleh konsumen global.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi memiliki potensi besar untuk berkembang secara berkelanjutan, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan prinsip ESG dan strategi pemasaran hijau. Oleh karena itu, diperlukan penelitian kuantitatif untuk mengukur secara empiris pengaruh penerapan prinsip ESG dan strategi pemasaran hijau terhadap keberlanjutan usaha pengolahan limbah pelepah

sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat, khususnya di Kecamatan Bahorok, Hinai, Secanggang, dan Wampu.

Dengan demikian, penting untuk meneliti sejauh mana penerapan prinsip ESG dan strategi pemasaran hijau berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat.

Bedasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Pengaruh Penerapan Prinsip ESG Dan Strategi Pemasaran Hijau Terhadap Keberlanjutan Usaha Pengolahan Limbah Pelepah Sawit Menjadi Lidi DiKabupaten Langkat (Studi pada kecamatan Bahorok,Hinai,Secanggang dan Wampu).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) yang terdiri dari aspek Environmental, Social, dan Governance berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat?
2. Apakah strategi pemasaran hijau (green marketing) yang terdiri dari green product, green price, dan green promotion berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat?
3. Apakah penerapan prinsip ESG dan strategi pemasaran hijau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip ESG yang meliputi aspek *environmental*, *social*, dan *governance* terhadap keberlanjutan usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat.
2. Untuk menganalisis pengaruh strategi pemasaran hijau yang meliputi *green product*, *green price*, dan *green promotion* terhadap keberlanjutan usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip ESG dan strategi pemasaran hijau terhadap keberlanjutan usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah kajian ilmiah mengenai penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam konteks usaha kecil dan menengah, khususnya sektor pengolahan limbah.
- b. Memberikan pemahaman empiris tentang pengaruh ESG dan strategi pemasaran hijau terhadap keberlanjutan usaha, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha, Memberikan gambaran dan rekomendasi tentang pentingnya penerapan prinsip ESG dan strategi pemasaran hijau untuk meningkatkan keberlanjutan usaha pengolahan limbah pelepah sawit menjadi lidi di Kabupaten Langkat.
- b. Bagi peneliti ,Menjadi referensi dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep keberlanjutan usaha, tanggung jawab lingkungan, dan pemasaran hijau di sektor industri kreatif berbasis limbah.